

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Hendra Maujana Saragih¹
Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional FISIP
Universitas Nasional
hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id
hendramaujana@gmail.com

Abstract

This study discusses Indonesia's diplomatic efforts from a defense perspective which Indonesia has initiated a number of initiatives to manage disputes in the South China Sea in order to avoid conflicts. Diplomatic efforts are certainly worth thumbs up and appreciated. Although Indonesia is not a claiming country in the territory of the dispute, but Indonesia has also interests in these waters. In addition to the political interests associated with regional stability, Indonesia has also economic interests in the South China Sea, particularly in the exclusive economic zone (ZEE). For the first time, the stability of the area in the South China Sea will have direct implications for Indonesia primarily on Indonesia's sovereign territory in the Natuna Sea and its surroundings. To face such a scenario, Indonesia must also prepare its defense force to anticipate conflicts in the South China Sea mainly in Natuna. The application of the universal defense strategy still refers to development. State defense system built on priority scale through: improving the professionalism of the TNI, preparing and developing people power, and developing defense technology in support of the availability of Alutsista. Several ways of defense by Indonesia to protect the country

Keywords: Defence, Diplomacy, Security, Strategy

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya diplomatik Indonesia dari perspektif pertahanan dimana Indonesia telah banyak menggagas sejumlah inisiatif untuk mengelola sengketa di laut china selatan agar tidak terjadi konflik yang lebih meluas. Usaha-usaha diplomatik tersebut tentunya patut diacungi jempol dan dihargai. Meskipun Indonesia bukan bukan negara pengklaim di wilayah sengketa itu, akan tetapi Indonesia memiliki pula kepentingan di perairan tersebut. Selain kepentingan politik yang terkait dengan stabilitas kawasan, Indonesia mempunyai pula kepentingan ekonomi di Laut China Selatan, khususnya pada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Untuk kepentingan pertama, stabilitas kawasan di Laut China Selatan akan berimplikasi langsung terhadap Indonesia utamanya terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya. Untuk menghadapi skenario seperti itu, Indonesia harus pula mempersiapkan kekuatan pertahanannya guna mengantisipasi konflik di Laut China Selatan utamanya di Natuna. Penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan. Sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista. Beberapa cara pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia guna melindungi negaranya

Kata Kunci Diplomasi Petahanan, Kemanan, Strategi

¹ Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Fokus dunia internasional dan menjadi perbincangan hangat dan strategis adalah kawasan Laut China Selatan yang mana merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional tentunya.²

Di Asia Tenggara sendiri, isu pertahanan telah terwujud dalam diplomasi pertahanan yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Secara umum, ada empat pola kerjasama keamanan di Asia Tenggara.³ Pola pertama adalah kerjasama pertahanan multilateral antara *external powers* dan negara-negara di Asia Tenggara yang ditujukan untuk masalah keamanan tertentu. Pola kedua adalah kerjasama pertahanan dan keamanan yang dipimpin Amerika dengan perjanjian kerjasama dengan sekutu, partner strategis. Pola ketiga adalah upaya kerjasama multilateral yang dipimpin oleh China untuk mengikat ASEAN menjadi struktur kerjasama keamanan regional Asia Timur dengan fokus utama pada isu-isu keamanan non-tradisional.

Dan pola terakhir adalah kerjasama multilateral dengan ASEAN sebagai pusatnya untuk meningkatkan kerjasama keamanan baik diantara anggotanya maupun mitra dialog dan diantara anggota ASEAN Regional Forum (ARF).

Kebangkitan China dan hegemoni Amerika, khususnya di kawasan Asia Tenggara juga menghadirkan kondisi baru pada pergerakan dunia saat ini. Kebangkitan China memberikan sinyal akan (atau sedang) adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional. *Unipolar system* yang selama ini dikomandoi oleh Amerika, khususnya di Asia Tenggara, ‘terancam’ dengan kehadiran China di kawasan ini. Sedangkan kebijakan *US pivot to Asia* yang digencarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan sinyal bahwa Asia merupakan kawasan penting bagi Amerika dan terdapat kepentingan nasionalnya di kawasan ini. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21.⁴

Di lain pihak, negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya “negara lemah”, berada dalam setidaknya beberapa opsi. Pertama, bersekutu dengan China agar

² Hasrul Sani Siregar, “Sengketa DI Laut China Selatan”, <http://www.riapos.co/2939-opini-sengketa-di-laut-cina-selatan.html> diakses pada 21 April 2016.

³ Jonathan R. Martin. Balancing and Bandwagoning in the South China Sea. Master Thesis.

⁴ <http://www.fkparitim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/>.

tidak menjadi musuh atau kedua memperkuat diri dengan membentuk satu ikatan bersama dan menyeimbangkan China.

Terlepas dari pilihan-pilihan tersebut, jelas saat ini sedang terjadi perubahan lingkungan keamanan dan strategi karena akan terbentuknya keseimbangan baru. Masalahnya adalah pada negara-negara ASEAN. Karena pilihan apapun yang dibuatnya akan mempengaruhi dirinya secara internal maupun eksternal. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa negara-negara ASEAN membentuk kerjasama, termasuk dalam pertahanan-keamanan dan memilih cara-cara “damai” apa yang disebut “diplomasi pertahanan”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Negara mempunyai kepentingan tersendiri dalam hal-ekonomi, politik dan kepentingan nasional mereka, tetapi untuk menjaga stabilnya kawasan, peningkatan pertahanan wajib dibentuk bersama. Karena menyangkut kelancaran masing-masing kepentingan yang hendak dicapai, serta keuntungan (*benefit*) yang didapat. Lebih lagi mencakup lancarnya komunikasi antar Negara, kelancaran ekonomi, dan dapat mendekatkan hubungan secara bilateral maupun multilateral.

Kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara jauh berbeda dengan wilayah regional lainnya dikarenakan adanya unsur

budaya yang telah terbentuk, seperti halnya yang ditunjukkan ASEAN Value, dan ASEAN Way dimana budaya yang ada selalu berada pada depan ketika konflik terjadi.⁵ Melihat pada Konsepsi *Cooperative Security*, ASEAN Value digunakan disini karena pada pemahaman *cooperative security* adalah adanya komunikasi, konsultasi, dan rasa saling percaya satu sama lain, dimana ancaman yang ada di maritime tidak lepas pada permasalahan kedaulatan yaitu teritorial. Perlunya pembentukan kesadaran saling percaya sangat dibutuhkan disini agar tidak ada kecurigaan dalam kerjasama. Pada permasalahan kerjasama pertahanan kelautan (*maritime*), ancaman kejahatan lintas batas negara yang menggunakan perairan tidak hanya pada persoalan individu tetapi merupakan persoalan bersama. ASEAN sebagai komunitas regional yang menjadi wadah bagi setiap anggotanya menjadi penting untuk meluaskan cakupan yang dapat mengontrol keamanan wilayah maritim, seperti contoh kerjasama keamanan di perbatasan, kerjasama di wilayah perairan international, kerjasama di jalur strategis perdagangan international.

Posisi Indonesia dan peran penting yang dimainkan tentulah menjadi motor penggerak

⁵ Walter Pinem, “ASEAN dan Perdamaian Kawasan”, <https://www.seniberpikir.com/asean-dan-perdamaian-kawasan/>, diakses 18 April 2016.

dalam pemecahan konflik laut chona selatan tentunya dimana pembentukan ASEAN Maritime Forum yang dianggap tepat waktu ini mengingat adanya kebutuhan dalam menangani masalah maritim di ASEAN yang selama ini dibahas oleh badan-badan sektoral yang berbeda, serta untuk menerapkan Deklarasi Pemimpin ASEAN dan blueprints Pernyataan Masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan guna meningkatkan hubungan regional melalui saling keterkaitan, sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN.⁶

1.2. Kerangka Teoritis

Adapun Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **Diplomasi Pertahanan** dimana saat ini, pemahaman keamanan telah mengalami perubahan. Negara tidak lagi memahami keamanan hanya sebatas ancaman yang sumbernya dari negara lain dan bersifat militer. Isu yang berkembang dalam isu keamanan tidak lagi sebatas keamanan negara (*state security*) namun keamanan individu (*human security*). Dalam pemahaman keamanan non-tradisional, isu yang berkembang dalam keamanan saat ini mulai dari keamanan pangan, lingkungan hidup (*global warming*), ekonomi, dan sebagainya. Ancaman yang didapat dari

negara tidak lagi hanya dari negara lain saja, namun bersumber dari *non-state actor* dan bersifat *transboundary*.

Oleh karena itu negara sadar betul, dibutuhkan diplomasi multilateral dan dibentuknya suatu badan kerjasama untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini berlanjut dengan berkembangnya kerjasama bilateral maupun multilateral baik regional maupun global.

Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen), namun juga organisasi non-pemerintah, think tank dan masyarakat sipil. Inilah yang membedakannya dengan diplomasi militer, dimana diplomasi militer fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi terkait isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko dan biaya rendah. Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan

⁶*Ibid.*

keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.

Diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini adalah hasil kepercayaan dan apresiasi negara-negara pada pertemuan-pertemuan multilateral untuk mendiskusikan masalah keamanan dalam level regional maupun internasional.

Teori berikutnya adalah yang berhubungan dengan **Keamanan** dimana merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Negara berjuang untuk meningkatkan kekuatan (*power*) untuk menciptakan keamanan. Negara berjuang untuk meningkatkan kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman (*threat*). Untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*), negara bertindak rasional dengan mementingkan kekuatan, terutama peningkatan kekuatan pertahanan.

Ada dua teori untuk menjelaskan perilaku negara-negara dalam politik internasional. Yang pertama adalah **teori perimbangan kekuatan** (*balance of power*) dikembangkan oleh seorang pakar Hubungan Internasional Kenneth Waltz. Ada dua asumsi Waltz dalam teori ini. Yang pertama, negara adalah aktor utama dalam politik internasional dan minimal negara akan berusaha

mempertahankan kekuasaannya. Maksimalnya, negara akan mencari dominasi dalam sistem internasional. Asumsi kedua adalah, negara akan melakukan pendekatan rasional dengan cara-cara yang ada/memungkinkan untuk mencapai tujuannya.

Adapun dalam UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Dari pernyataan tersebut maka tiga hal yang harus dipertahankan adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dan ini merupakan kepentingan vital bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pertahanan tersebut, Indonesia menetapkan untuk menggunakan strategi penangkalan.

Konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Penangkalan** yang

merujuk kepada Lawrence Freedman dalam bukunya *Deterrence* menjelaskan prinsip utama dari penangkalan, yaitu bahwa penangkalan sebenarnya adalah suatu strategi penggunaan kekuatan (*coercive strategy*). *Coercive* didefinisikan oleh Freedman sebagai: “*the potential or actual application of force to influence the action of a voluntary agent*”. Konsep penangkalan yang dikembangkan dalam strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya perang adalah strategi penangkalan dengan cara penolakan (*denial*) dan penangkalan dengan cara pembalasan (*retaliation*). Penangkalan dengan penolakan pada dasarnya merupakan daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal sehingga pihak lawan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia. Kekuatan pertahanan dengan kemampuan penangkalan dengan cara penolakan adalah tingkat kemampuan yang mampu meyakinkan lawan atau calon lawan bahwa apabila melancarkan agresi atau menyerang Indonesia, akan dialami kegagalan sebelum masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga dengan pertimbangan itu, calon lawan akan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia.

1.3. Permasalahan

Adalah suatu keharusan suatu negara dalam mempertahankan wilayah

kedaulatannya sebagai kepentingan nasional dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan. Dibentuknya kerjasama maritim ini sangat penting bagi ASEAN mengingat bahwa sebagian besar negara-negara anggotanya memiliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari domain laut. Sumber daya kelautan yang penting untuk ketahanan pangan dan jalur laut, juga sangat penting untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan. Sementara untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan maritim yang ada tentunya diperlukan suatu kolaborasi.

Dalam hal ini fokus permasalahan yang dihadapi oleh AMF dalam menampung konflik yang ada sehubungan dengan kondisi maritim kawasan adalah: “Bagaimana penerapan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan?”.

1.4. Urgensi dan Tujuan Penelitian

Sebagai pendiri ASEAN dan motor penggerakannya maka penting kiranya untuk melihat dan memotret kembali upaya-upaya serius yang sudah dilakukan Indonesia dalam menerapkan diplomasi pertahanan pada masalah laut china selatan agar menjadi acuan penting bagi kawasan dan organisasi yang ada

di dalamnya dan inilah urgensi dari penelitian ini.

Penelitian ini tentunya bertujuan mengetahui awal mula terjadinya konflik yang tidak kunjung usai yang melibatkan banyak negara di kawasan Laut China Selatan dan ingin mengetahui upaya Indonesia dalam melakukan Diplomasi Pertahanan guna memenuhi kepentingan Indonesia pada tataran regional

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif yang Menurut David Williams (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indonesia dan Pusaran Konflik Laut China Selatan

Bagi Indonesia sangat sulit untuk dielakkan bahwa Laut China Selatan mempunyai makna penting dan strategis. Meskipun Indonesia bukan pada posisi Negara yang ikut melakukan klaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, tetapi pada tataran ASEAN Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai negara terbesar di ASEAN yang mengharuskan Indonesia ikut andil dalam diplomasi pertahanan di kawasan tersebut tentunya. Banyak hal yang membuat Indonesia tidak boleh tinggal diam dengan kondisi di Laut Selatan itu yang antara lain adalah perairan merupakan pilar penting bagi kegiatan ekspor impor Indonesia, hal lainnya adalah dapat dipastikan bahwa perdagangan internasional dikawasan itu akan terganggu dan sudah pasti tidak nyaman, berikutnya wilayah itupun sebagai pintu masuk dari arah utara kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tentunya.

Mengatasi konflik ini, Indonesia haruslah memahami betul posisi Negara-negara yang

⁷*Ibid. Hal 5.*

mengklaim wilayah tersebut dan hendaknya titik tekan integrasi ASEAN tetap harus menjadi hal yang diutamakan. Hal itu wajib diusahakan oleh organisasi ini agar tidak membuka peluang bagi pihak eksternal untuk mengintervensi wilayah konflik yang pasti mempunyai konsesi-konsesi politik pada akhirnya.

Bahwa ASEAN sudah berusia 50 tahun lebih bukan berarti dapat dikatakan organisasi ini sangat mumpuni memecahkan masalah-masalah krusial yang ada di dalamnya. Justru seperti problem ASEAN semakin menggunung dan selalu saja mengalami hambatan dalam penyelesaiannya terlebih lagi soal Laut China Selatan.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa perbedaan setiap negara dalam menghadapi masalah laut china selatan masih menghantui ASEAN, tidak hanya itu saja dalam persoalan lain seperti teroris dan ekonomi pun masih terbelang sama. Hal ini dikarenakan ada pengaruh dari negara-negara di luar Asia Tenggara yang selain itu juga banyaknya negara yang terlibat di dalamnya. Karena itu Indonesia berusaha untuk mempengaruhi untuk objektif bagaimana memandangnya. Walaupun tidak boleh terdapat keraguan untuk menyelesaikannya.

Adalah penting untuk melakukan konsolidasi internal ASEAN dimana China tidak akan membawa konflik ini akan semakin melebar dan membesar karena perdagangannya mayoritas menggunakan jalur laut china selatan, maka tidak salah kiranya jika Indonesia berusaha memperkuat perbatasannya karena ada Natuna yang menghasilkan sumber daya alam bagi RI.

Indonesia mempunyai peluang besar memainkan peran yang lebih strategis dalam forum negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tetap yang paling berpengaruh di ASEAN, peran yang lebih aktif tentu akan mendorong kawasan Asia Tenggara memiliki stabilitas ekonomi, politik dan keamanan yang kuat dan ini penting untuk Indonesia dengan didukung rancangan besar politik luar negeri. Selain itu peran lebih besar akan tumbuh jika Indonesia terus meningkat kekuatan ekonomi, pertahanan, dan budayanya yang salah satunya, mengatasi perselisihan teritorial di Laut China Selatan yang menciptakan ketegangan di kawasan meskipun membutuhkan waktu yang panjang dan lama dengan mewujudkan *ASEAN Peacekeeping Force* dan akan bisa diperbantukan mengatasi persoalan keamanan dan konflik yang terjadi.⁸

⁸ Aaroon L. Connely, Indonesia berjalan sendiri di Laut china selatan, Lowi Institute 5 april 2017

Dapat dilihat dengan gamblang bahwa di bawah Presiden Jokowi, pendekatan Indonesia terhadap masalah klaim kepemilikan Laut Cina Selatan sudah bergeser dari pendekatan aktor aktif yang berupaya mencari perdamaian atas sengketa yang terjadi menjadi pendekatan yang utamanya berfokus pada melindungi kepentingan nasionalnya sendiri utamanya di sekitar Kepulauan Natuna sambil tidak menimbulkan rasa tidak senang Tiongkok. Hal itu lebih karena Indonesia memandang bahwa Tiongkok sudah banyak melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Cara Indonesia yang unilateral mengakibatkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara lebih terisolasi dan rentan terhadap tekanan diplomasi Cina daripada sebelumnya. Ini juga yang bisa mengurangi kebersamaan ASEAN dalam menghadapi tekanan Tiongkok berikutnya sehingga melahirkan kontestasi yang lebih sengit antara negara-negara besar di wilayah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa tindakan Jokowi terhadap Laut Cina Selatan dan keinginannya untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan Beijing akan selalu langgeng boleh jadi akan memburuk manakala Tiongkok tidak menepati janji-janjinya dalam bidang

investasi dan itupun bisa menjadi membuat Indonesia meradang di Natuna Sana.

Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo terbang ke Ranai, pertama kalinya seorang Presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Dengan mengenakan jaket *bomber*, ia menaiki KRI Imam Bonjol dan ia mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Di situlah, mereka mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah tersebut, yang kaya akan ikan dan gas alam.⁹

Tentu kunjungan ini bukan tidak punya pesan khusus yang mana mengirim sinyal ke pemimpin Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan memproteksi hak dan kedaulatannya di ZEE-nya, jika perlu dengan kekerasan. Tindakan berani Jokowi mendapatkan apresiasi baik dalam maupun luar negeri.

Tetapi disinilah blundernya dimana kunjungan ini dapat mengaburkan sikap akomodatifnya yang boleh jadi Tiongkok berpikir ulang untuk investasi pada bidang infrastruktur. Walaupun Jokowi telah menyatakan retorikanya yang tegas tentang hak-hak kelautan, Indonesia berusaha agar dalam kampanyenya melawan penangkapan ikan liar, mereka tidak membidik kapal-kapal

(<https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-laut-cina-selatan-berjalan-sendiri>)

⁹ ibid

Tiongkok; dan dalam diplomasi regionalnya, pemerintahan Jokowi berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan agar mereka tidak menyinggung perasaan pihak Beijing.

Posisi Indonesia ini penting, karena sebagai negara terbesar dan berpopulasi terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia telah sejak dulu dianggap sebagai yang paling berpengaruh di antara negara-negara di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang memimpin diplomasi penting wilayah tersebut dalam isu-isu seperti sengketa-sengketa Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, perubahan sekecil apa pun dalam pendekatan Indonesia dapat berakibat luar biasa besar bagi wilayah tersebut.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Jokowi yang lebih luas dan fokusnya pada investasi infrastruktur. Terdapat alasan mengapa pendekatan baru Jokowi mungkin tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya perubahan dalam pendekatan Indonesia telah berakibat negatif pada kestabilan regional dan kepentingan-kepentingan jangka panjang Indonesia.

Selama klaim dan tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah menyentuh semua negara di sepanjang pesisir perairan tersebut, persengketaan Tiongkok dengan Indonesia seringkali tertutupi oleh sengketa-sengketa

yang lebih meresahkan dengan negara-negara yang lebih dekat dengan daratan Tiongkok, terutama Filipina dan Vietnam.

Pihak Beijing tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas tentang sifat klaim yang disiratkan oleh garis putus-putus justru pernyataan pihak Tiongkok yang paling ekspansif telah menyiratkan bahwa garis putus-putus tersebut menunjukkan suatu klaim pada suatu perairan teritorial, atau pada suatu ZEE. Pernyataan-pernyataan lain telah menyiratkan bahwa garis tersebut hanyalah garis panduan yang menggambarkan klaim-klaim Tiongkok atas hak-hak penangkapan ikan di dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya, namun tidak pada hak-hak kelautan terpisah apa pun. Tidak seperti negara-negara lain di wilayah tersebut yang terkena dampak garis putus-putus Tiongkok, Tiongkok dan Indonesia tidak berselisih mengenai kedaulatan atas daratan apa pun. Oleh karenanya, bagi Indonesia, klaim-klaim kelautan Tiongkok di dalam garis putus-putus itulah masalah utamanya.

Para pejabat Indonesia telah berulang kali meminta Tiongkok memperjelas sifat garis putus-putus itu sejak mereka pertama kali mengetahui pada tahun 1993 bahwa garis itu mencakup bagian dari ZEE Indonesia. Pada bulan Juli 2010, Indonesia menulis dalam

catatan verbal (*note verbale*) kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa garis tersebut “jelas-jelas tidak memiliki basis hukum internasional”, dan bahwa garis tersebut menimbulkan risiko pembalikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Kelautan atau *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS). Namun, pada umumnya Indonesia telah berpendapat bahwa, karena berdasarkan hukum internasional klaim apa pun atas hak-hak kelautan seperti perairan teritorial, ZEE, atau hak penangkapan ikan tidak dapat disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan, dan karena tidak ada persengketaan antara Tiongkok dan Indonesia mengenai kedaulatan atas daratan, sikap yang paling baik adalah mengabaikan adanya garis tersebut. Telah ada sebuah konsensus di Jakarta bahwa memperkarakan garis tersebut akan memberikan pengesahan yang sebenarnya tidak layak didapatkan.¹⁰

Indonesia memperoleh manfaat utama dari keengganannya mengakui garis putus-putus itu, sikap ini memungkinkan Indonesia untuk memperlakukan ketidaksepakatan apa pun yang muncul akibat tindakan Tiongkok di wilayah-wilayah yang tumpang tindih itu sebagai hal yang tidak berhubungan dengan sengketa-sengketa negara-negara lain di

kawasan itu akibat garis putus-putus pihak Beijing. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak ikut menggugat dalam persengketaan-persengketaan Laut Cina Selatan yang lebih luas. Ini adalah status yang telah lama dikatakan para pejabat Indonesia memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai “perantara yang tidak memihak” (“*honest broker*”) dalam negosiasi mengenai sengketa-sengketa tersebut, contohnya dengan menjadi tuan rumah “lokakarya-lokakarya” informal tentang isu-isu tersebut dari tahun 1990 hingga 2014. Akan tetapi, setelah lebih dari seperempat abad, masih belum jelas apa hasil dari jasa-jasa Indonesia dalam negosiasi-negosiasi ini. Terlebih lagi, keengganannya Indonesia untuk menantang adanya garis putus-putus itu secara lebih terbuka melemahkan upaya-upaya internasional untuk mendorong mundur klaim-klaim Tiongkok yang cenderung meluas, meskipun keengganannya ini memungkinkan Indonesia menghindari perbincangan-perbincangan sulit dengan Tiongkok.

B. Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Bawah Joko Widodo

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara.

¹⁰ *ibid*

Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyebut strategi ini sebagai suatu “keseimbangan dinamis”, dan melalui strategi ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua negara itu. Dengan demikian, Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap-sikap yang terlihat tidak konsisten dengan kepentingan Indonesia sendiri dalam isu-isu tertentu.

Dalam hubungannya dengan persengketaan Laut Cina Selatan, hal ini berarti bahwa seiring dengan meningkatnya kekhawatiran AS akan persengketaan ini, yang dimulai dengan intervensi Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Forum Regional ASEAN di Hanoi pada tahun 2010, semakin kecil kemungkinan Indonesia berpihak pada posisi-posisi AS dalam isu tersebut, walaupun jika hal ini dilakukan, langkah ini akan dapat menguntungkan Indonesia. Misalnya, pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, menampik permohonan Tiongkok agar Laut Cina Selatan jangan dimasukkan ke dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur pada 2011 di Bali — namun ia juga menolak saran-saran AS

agar ia memfasilitasi pertemuan itu dengan cara yang mengisolasi pihak Beijing, walaupun ia sendiri khawatir akan perilaku Tiongkok. Akan tetapi, seiring dengan kontinuitas ini, ada pula perubahan-perubahan penting pada pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi, yang mempengaruhi cara Indonesia memandang kepentingan-kepentingannya terkait negara-negara besar itu, dan kepentingan-kepentingannya di Laut Cina Selatan.¹¹

Dengan pandangan bahwa diplomasi sebagai upaya elitis yang terlalu mengurus konsep-konsep abstrak, Jokowi khususnya berpandangan skeptis akan manfaat *summit diplomacy* (diplomasi multilateral lewat pertemuan puncak), yang ia hubungkan dengan gaya keliling dunia Yudhoyono. Saat ia menduduki jabatan, kebijakan luar negeri menjadi kurang penting karena penekanan baru pada pengembangan ekonomi. Ia menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berfokus pada ‘diplomasi membumi’, yang diartikan sebagai diplomasi yang akan ‘berguna bagi rakyat’, dengan fokus khusus pada perdagangan dan investasi. Demikian pula, ia memulai penumpasan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing, walaupun ada keberatan dari para

¹¹ *ibid*

diplomasi bahwa hal itu akan merusak hubungan Indonesia dengan para tetangganya. Peran Tiongkok dalam masing-masing inisiatif ini semakin terbuka.

Meskipun demikian Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna, sebuah pulau yang kaya akan gas alam, dimana wilayah itu tumpang tindih dengan wilayah yang diakui sebagai kedaulatan Cina. Langkah Indonesia ini merupakan tanggapan terhadap apa yang dianggap sebagai "ancaman Cina" terhadap kedaulatan Indonesia di pulau ini, yang "cepat atau lambat" akan berdampak pada Indonesia. Jakarta mengatakan akan meneruskan "kebijakan netral" terhadap Cina, di tengah memanasnya ketegangan ketika beberapa pejabat mengkritik Cina karena mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berdekatan dengan Natuna sebagai wilayah Cina.

Penekanan terhadap posisi netral ini datang sesudah Cina menyatakan "tak keberatan" terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Natuna. Namun Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamirzad Ryacudu mengatakan tak aman untuk mengabaikan kemungkinan ancaman di masa depan, sekalipun situasi tampaknya meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia telah memperkuat kapasitas militer untuk mengantisipasi

berbagai ancaman, baik itu pencurian ikan atau masuknya Cina ke wilayah Indonesia secara ilegal. Alasannya adalah aktifnya Cina di bagian lain Laut Cina Selatan, dimana militer Indonesia "tak bisa menutup mata."

Angkatan Darat, Laut dan Udara Indonesia telah menyusun formula untuk memperkuat pertahanan di Natuna. Pihak militer mengatakan sedikitnya ada tambahan satu batalion untuk memperkuat pangkalan angkatan laut yang sudah ada di Natuna. Angkatan Darat, yang sekarang mengerahkan 800 prajurit di Natuna, akan menambah jumlahnya hingga 2.000 di tahun 2016. Angkatan Udara juga akan menambah pesawat tempur di wilayah itu.

Bahwa Natuna saat ini kekurangan fasilitas untuk mengakomodasi sejumlah besar pesawat. Angkatan Laut telah mengirim tujuh kapal perang ke perairan Natuna bulan lalu untuk berkeliling dan "menjaga kedaulatan", Angkatan Laut mengirim 14 kapal perang untuk mengawasi Laut Cina Selatan. Sektor pertahanan udara juga mengerahkan radar di beberapa bagian pulau untuk melakukan operasi pengawasan selama 24 jam. Sebagai tambahan, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Jepang awal bulan ini untuk menerima teknologi dan peralatan militer, yang sebagian besarnya dikirim untuk digunakan di Pulau Natuna.

Indonesia juga berminat untuk bergabung dengan latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah ini. Sudah dua kali latihan dilakukan bersama AS di Batam yang berjarak 480 km dari Natuna. Latihan ini termasuk penggunaan pengawasan dan pesawat patroli, seperti penggunaan pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal di permukaan dan kapal selam. Menteri pertahanan mengatakan telah menghabiskan US\$14,2 juta (sekitar Rp196 miliar) untuk memperkuat pangkalan militer di Pulau Natuna. Namun pemerintah membantah bahwa penguatan tersebut merupakan antisipasi terhadap peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia lebih suka menyebutnya sebagai "diplomasi pertahanan."

Sudah lama ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan terlibat dalam pertikaian di Laut Cina Selatan karena pentingnya kawasan perairan tersebut. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang mengantarkan barang dan jasa internasional dengan nilai US\$5 triliun yang merupakan lima kali lipat GDP Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu di atas meja, Cina dan negara-negara lain di kawasan itu - juga Amerika Serikat - sudah mulai terlibat pertikaian mengenai kendali teritorial di wilayah tersebut. Cina saat ini disebut-sebut sudah melakukan penimbunan laut dengan

kecepatan yang mengkhawatirkan pihak lain.¹²

Sekalipun Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ingin tetap menjadi "perantara yang jujur" dalam perselisihan ini, dan "tak ada alasan" untuk terlibat, Indonesia pelan-pelan meningkatkan kehadiran militer di Natuna guna mengirim peringatan dan sinyal bahwa Indonesia tak ingin jadi bulan-bulanan.

4. KESIMPULAN

Diplomasi pertahanan Indonesia menerapkan beberapa strategi yaitu: Dalam aspek negara, dimana Indonesia melakukan strategi diplomasi terhadap negara-negara yang mengklaim laut china selatan agar konflik di laut china selatan dapat berkurang ketegangannya, dan juga lewat konflik ini Indonesia sebagai motor dan pengagas terbukanya kerjasama multilateral antara negara-negara yang aktif dalam konflik laut china selatan tersebut.

Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dapat diperkirakan terus menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna, baik melalui pengiriman tenaga militer dan peningkatan kegiatan ekonomi yang diarahkan negara. Namun, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif di dalam

¹² ibid

ASEAN terkait isu lebih luas mengenai Laut Cina Selatan.

Indonesia membuat pangkalan militer sebagai landasan di pulau natuna yang terletak bersebrangan dengan laut china selatan, fokus utama dari strategi udara ini adalah sebagai penangkal jika terjadinya interaksi militer di pulau natuna, karena indonesia membawa kepentingan nasionalnya yaitu hanya sebagai jembatan atas aktor-aktor yang terjun secara langsung dalam konflik laut china selatan tersebut. dan juga indonesia dalam uu indonesia salah satu isinya yaitu indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia dan penyelesaian konflik.

Dalam aspek laut, dimana indonesia walaupun ingin memperjuangkan dan berperan aktif dalam konflik laut china selatan tetapi indonesia tidak lupa juga untuk mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI nya. lalu strategi indonesia dalam aspek maritim yaitu menjaga pulau natuna dengan kapal perang yang di upgrade demi menjaga daerah tersebut agar tetap stabil.

Dalam aspek darat, strategi yang dilakukan indonesia yaitu membuat indonesia sebagai motor, penggerak dan jembatan dari pembentukannya forum-forum yang diadakan baik di asean, maupun asosiasi. forum ini dibentuk agar konflik di laut china selatan

dapat mereda, lalu munculnya solusi atas penyelesaian konflik tersebut.

Indonesia harus tetap hati-hati dengan situasi lapangan yang selalu akan berganti-ganti dari hari ke hari maka penting kiranya lebih intensif menjaga daerah terluar agar tidak mudah di klaim oleh Negara manapun juga.

DAFTAR PUSTAKA

E-Journal by Akmal Universitas Riau FISIP Hubungan Internasional. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014.

Ketahanan Nasional. Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Konflik laut China Selatan. Lembaga Pertahanan Nasional RI. XIX(3).

Kurnia Erwin N.M. "Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas

Nur Sandy Ikfal Raharjo "Indonesia's Role In The South China Sea Dispute Resolution 2014

Nyoman I Sudira, "*Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*",

Nur Sandy Ikfal Raharjo "Indonesia's Role In The South China Sea Dispute Resolution 2014

Buzan, Barry and Ole Waever), *Regions and Powers The Structure of International Security*, Cambridge University Press. 2008

Spanier Jhon , *Games National Play, Fifth Edition*, Holt, Reinhard & Winston, New York, 1984

Rencana Strategis 2015-2019.”Kementrian Luar negeri

Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. LIPI

Web Site

<https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea>

<http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim>